



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA JAYAPURA



TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Halaman	i
Kata Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	lii
Bab I Pendahuluan.....	I.1
I.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	I.1
I.2. Isu Strategis	I.3
I.3. Dasar Hukum.....	I.4
1.4. Sistematika Lakip.....	1.5
Bab II Perencanaan Kinerja.....	II.1
II.1 Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Tahun 2017.....	II.1
II.2. Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2017.....	II.2
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	III.1
III.1. Capaian Kinerja.....	III.1
III.2. Realisasi Anggaran.....	III.8
Bab IV Penutup.....	IV.1
IV.1 Kesimpulan.....	IV.1
IV.1 Rekomendasi.....	IV.2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas AnugrahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017, dapat disusun dan disampaikan.

Laporan Kinerja ini disampaikan sebagai laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 serta capaiannya yang terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan, disampaikan terima kasih untuk saran demi perbaikan penulisan Laporan Kinerja ini.

Jayapura, Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAYAPURA.**

**NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM
PEMBINA TK I
NIP. 19650814 198703 1 018**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air
 - a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota
 - b. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kota
2. Air Minum
Pengelolaan dan pengembangan SPM di Daerah Kota
3. Persampahan
Pengembangan system dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kota
4. Air Limbah
Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic dalam Daerah Kota
5. Drainase
Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota
6. Permukiman
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kota
7. Bangunan Gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kota
9. Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kota

10. Jasa Kontruksi

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil kontruksi
- b. Penyelenggaraan system informasi jasa kontruksi cakupan Daerah Kota
- c. Penerbitaan izin usaha jasa kontruksi nasional (non kecil dan kecil)
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi

11. Penataan Ruang

Penyelenggaran penataan ruang Daerah Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura merupakan OPD yang bertanggung jawab kepada Walikota Jayapura sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam wilayah Kota Jayapura. Hal ini tertuang dalam PerdaNo 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura tertuang dalam Peraturan Walikota Jayapura No 31 Tahun 2016

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura Kota Jayapura mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
- ❖ Bidang Bina Marga, terdiri atas
 - Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Jasa Konstruksi
- ❖ Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - Seksi Drainase dan Sanitasi
 - Seksi Pengendalian Bangunan dan Gedung
 - Seksi Penataan Lingkungan dan Pertamanan

- ❖ Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - Seksi Irigasi
 - Seksi Sungai Rawa dan Pantai
 - Seksi Air Bersih dan Air Limbah
- ❖ Bidang Persampahan, terdiri atas :
 - Seksi Pembersihan dan Pengumpulan
 - Seksi Pengangkutan dan Pengolahan
 - Seksi Perlengkapan dan Prasarana
- ❖ Bidang Penataan Ruang, terdiri atas :
 - Seksi Pengaturan dan Pembinaan
 - Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
- ❖ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

I.2. Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yg dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut ini beberapa permasalahan yg berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura, meliputi:

- 1) Belum memadainya tenaga profesional
1. Masih tingginya penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya serta tuntutan penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kota Jayapura, yang meliputi :
 - a. meningkatnya kualitas layanan jalan kondisi baik kota Jayapura
 - b. tersedianya konektivitas wilayah kota Jayapura

- 2) Pelatihan yang dilaksanakan belum terakreditasi sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya.
- 3) Masih rendahnya etos kerja petugas lapangan
- 4) Sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memenuhi syarat baik dari segi jumlah.
- 5) Penyediaan Sarana SR Air Minum
- 6) Pengelolaan Air Limbah Permukiman (Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai)
- 7) Ketersediaan Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan
- 8) Ketersedian Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan
- 9) Keterdianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
- 10) Tingginya pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukan, terutama di daerah sempadan kali sebagai tempat hunian
- 11) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang infrastruktur
- 12) Tingkat Partisipasi masyarakat yang belum optimal.
- 13) Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi memungkinkan tuntutan Infrastruktur meningkat
- 14) Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi.

I.3. Dasar Hukum

Hasil capaian kinerja yang disampaikan setiap tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) pasal 20 ayat (3)
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. PERMEN PAN RB No 53 tahun 2014 Tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.4. Sistematika Lakip

Penyampaian Laporan Kinerja ini disampaikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : adalah Pendahuluan yang menggambarkan tentang gambaran umum tugas dan fungsi Dinas PUPR tahun 2017, isu strategis yang dihadapi, dasar hukum dan Sistematika penulisan
- Bab II : adalah Perencanaan Kinerja yang menggambarkan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun 2017 yang meliputi perencanaan strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)
- Bab III : adalah Akuntabilitas Kinerja terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi anggaran yang meliputi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran serta realisasi anggarannya
- Bab IV : adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi yang menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas PUPR untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR tahun 2017

Berikut adalah sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR tahun 2017 :

1. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kota Jayapura, yang meliputi :
 - a. meningkatnya kualitas layanan jalan kondisi baik kota Jayapura
 - b. tersedianya konektivitas wilayah kota Jayapura
2. Penyediaan Air Minum
3. Pengelolaan Air Limbah Permukiman (Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai)
4. Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan
5. Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Setiap sasaran dari setiap IKU tersebut, formula perhitungan serta sumber data yang merupakan penanggung jawab setiap point IKU disampaikan pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja ini.

II.2. Perjanjian Kinerja Dinas PUPR tahun 2017

Dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR tahun 2017, berikut adalah program yang dilaksanakan Dinas PUPR tahun 2017 untuk setiap indikator Kinerja beserta pagu anggarannya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rupiah)
1	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan) pemukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.399.099.000
		Prosentase Pengangkutan Sampah di Perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.003.725.400
		Prosentase Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah		
2	Meningkatnya kualitas layanan jalan kota	Prosentase jalan kota Jayapura dalam kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura	2.000.0000.000
			Program Peningkatan Jalan & Jembatan	12.724.578.804
			Program Pembangunan Jalan & Jembatan	34.958.894.408
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.315.312.377

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	700.000.000
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.320.000.000
3	Peningkatan kualitas layanan air minum permukiman	persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.464.000.000
TOTAL				96.308.820.989

Program kegiatan tersebut diatas telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas PUPR tahun 2017 sebagaimana lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan) pemukiman perkotaan dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase penduduk yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai)

Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Sanitasi, dihasilkan Output sebagaimana table berikut :

Pembangunan Prasarana Sanitasi			
Belanja Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor			
- (SR) Distrik Jayapura Utara	SR	144	titik
	MCK	6	unit
	jiwa terlayani	252	jiwa
	jembatan kayu	97	m
- (SR) Distrik Jayapura Selatan	SR	72	titik
	MCK	3	unit
	jiwa terlayani	124	jiwa
- (SR) Distrik Abepura	SR	72	titik
	MCK	3	unit
	jiwa terlayani	124	jiwa
	jembatan kayu	13	m
- (SR) Distrik Heram	SR	72	titik
	MCK	3	unit
	jiwa terlayani	124	jiwa
- (SR) Distrik Muara Tami	SR	72	titik
	MCK	3	unit
	jiwa terlayani	124	jiwa
- Pengawasan		1	doumen

Dapat direkap melalui program / kegiatan ini, pada tahun 2017 masyarakat yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman adalah 748 jiwa. Capaian kinerja untuk indikator ini dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septic/MCK}}{\text{Jumlah total seluruh penduduk}} \times 100 \%$$

$$= (748 \text{ jiwa} / 417.492 \text{ jiwa}) \times 100\%$$

$$= 0,18 \%$$

Dengan demikian pada tahun 2017 ini Persentase penduduk yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman dicapai sebesar 0,18%

b. Prosentase Pengangkutan Sampah di Perkotaan

Bedasarkan Peraturan Menteri PUPR, pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah, perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut dari lingkungan permukiman.

Untuk meningkatkan Prosentase Pengangkutan Sampah di Perkotaan ini dilakukan melalui pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan outcome hingga tahun 2017 adalah :

$$\text{DUMP TRUCK} = 30 \text{ UNIT} \times 8 \text{ M}^3 \times 30 \text{ HARI} \times 1 \text{ TRIP} / \text{HARI} = 240 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$\text{ARM ROLL TRUCK} = 13 \text{ UNIT} \times 6 \text{ M}^3 \times 30 \text{ HARI} \times 4 \text{ TRIP} / \text{HARI} = 78 \text{ m}^3 / \text{hari}$$

Total 318 m³ perhari

Prosentase pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan.

$$= (A/B) \times 100 \%$$

$$= (127.200 / 417.492)/100\%$$

$$= 30,46 \%$$

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

$A = C / F$

$$A = (318 \text{ m}^3 \times 1000)/2,5 \text{ liter}$$

$$= 127.200 \text{ jiwa / hari}$$

Dimana:

C = Total sampah tertangani

F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari) = 2,5 liter untuk kota sedang

Hingga tahun 2017, persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan adalah 30,46 %

c. Prosentase Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.

Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

TPA dioperasikan minimal secara *controlled landfill* untuk kota kecil/sedang, dan minimal secara *sanitary landfill* untuk kota besar/metropolitan. Adapun Kota Jayapura adalah Kota Sedang.

Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkungan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pemrosesan akhir sampah. Hal ini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%), dengan perhitungan sebagai berikut :

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 1,0

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 0,5

Sanitary landfill = 1,0

Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0

Efluen memenuhi baku mutu = 1,0

Koefisien Penanganan Gas

Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0

Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5

Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

$$= (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$$

Dimana:

A = Koefisien pengoperasian TPA

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi

C = Koefisien penanganan gas

Untuk mewujudkan capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun 2017 dilaksanakan pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Jayapura dihitung sebagai berikut :

$$= (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$$

$$= (1 \times 40\%) + (0 \times 40\%) + (0 \times 20\%)$$

$$= 40 \%$$

2. Meningkatnya kualitas layanan jalan kota, dengan Indikator Kinerja Prosentase jalan kota Jayapura dalam kondisi baik

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada indikator ini, pada tahun 2017 dilaksanakan 6 Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran

Uncen Abepura

- Program Peningkatan Jalan & Jembatan
- Program Pembangunan Jalan & Jembatan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dari Keenam program kegiatan 2017 tersebut dihasilkan outcome jalan dalam kondisi baik adalah sepanjang 14.509.8 meter atau 14, 51 Km, dimana total panjang jalan kota hingga tahun 2017 adalah 258,34 Km

Peningkatan Prosentase jalan kota Jayapura 2017 dalam kondisi baik dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{\text{akhir tahun capaian}} \text{panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang}}{\sum_{\text{eksisting}} \text{Panjang Jalan Kota Jayapura}} \times 100 \%$$

$$= (14,51 \text{ km} / 258,34) \times 100 \%$$

$$= 5,62\%$$

3. Peningkatan kualitas layanan air minum permukiman, dengan Indikator Kinerja persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi,

maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupannya.

Untuk mewujudkan capaian kinerja pada indikator ini, tahun 2017 dilaksanakan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK Penugasan) dan kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi/Sambungan Rumah. Output dari kedua kegiatan tersebut adalah

Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK Penugasan)			
-	Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Jayapura Utara (SR)		
		800	m
		77	kk
-	Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Jayapura Selatan (SR)		
		1100	m
		160	kk
-	Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Abepura (SR)		
		4500	m
		550	kk
-	Peningkatan Jaringan Air Minum Bagi Masyarakat di Distrik Heram (SR)		
		2507	m
		352	kk
-	Jasa Pengawasan Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum (DAK IPD)		
		1	doumen

Total KK yang terlayani Sambungan Rumah (SR) = 1.139 KK

Dimana 1 KK setara dengan 5 jiwa, sehingga kegiatan ini melayani 1139 KK x 5 jiwa = 5.695 jiwa

Pembangunan Jaringan Distribusi/Sambungan Rumah			
-	Pembuatan Bak Penampung Air Bersih dan Pemasangan Pipa Air RT.04RW.09 Kel . Imbi		
	pipa	800	M
	SR	20	titik
	Bak	2	buah
-	Pemasangan Pipa PE '2' Distribusi diHamadi Lapangan Kel. Hamadi RT 2,3/RW6		
	pipa	1356	M
	SR	60	titik
-	Pembuatan Sumur Bor di Dok IX Kel. Tanjung Ria RT.03/RW.09		
	pipa	200	M
	SR	60	titik
	sumur bor	3	unit
-	Pembuatan Hydrant di RW V, RW VI di Kel. Gurabesi (dibelakang BRI)		
	pipa	978	M
	Bak	3	unit
	hydrant	9	unit
-	Jasa Perencanaan		
		1	doumen
-	Jasa Pengawasan		
		1	doumen

Total Sambungan Rumah dari kegiatan ini adalah 140 SR, dimana 1 SR melayani 5 jiwa, total jiwa yang terlayani melalui kegiatan ini adalah 140 SR x 5 jiwa = 700 jiwa.

persentase peningkatan jumlah masyarakat Kota Jayapura yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan tahun 2017 adalah

$$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian masyarakat terlayani}}{\sum \text{akhir tahun pencapaian proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$$

$$= \{(5.695 \text{ jiwa} + 700 \text{ jiwa}) / 417.464 \text{ jiwa}\} \times 100\%$$

$$= 1,53\%$$

Dengan demikian jumlah masyarakat Kota Jayapura yang mendapatkan akses terhadap air minum tahun 2017 meningkat sebesar 1,53%.

III.2. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan capaian kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah tabel yang menggambarkan total pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2017 setiap program dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana realisasi anggaran adalah 73,93%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran
1	Peingkatan kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan)	Persentase penduduk yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.399.099.000	3.221.848.800

	pemukiman perkotaan	(Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai)			
		Prosentase pengurangan sampah perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.003.725.400	9.963.114.921
		Prosentase Pengangkutan Sampah di Perkotaan			
		Prosentase Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah			
2	Meningkatnya kualitas layanan jalan kota	Prosentase jalan kota Jayapura dalam kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Jalan Kompleks Lapangan Trikora-Fakultas Kedokteran Uncen Abepura	2.000.0000.000	1.904.080.000
			Program Peningkatan Jalan & Jembatan	5.845.785.000	5.811.997.952
			Program Pembangunan Jalan & Jembatan	33.459.850.758	30.344.139.201
			Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan	500.000.000	500.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	700.000.000	700.000.000

			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.320.000.000	3.001.868.400
3	Peningkatan kualitas layanan air minum permukiman	persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.464.000.000	8.647.309.800
TOTAL				86.692.460.158	64.094.359.074

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya dapat Capaian Kinerja yang dicapai Dinas PUPR tahun 2017 disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman tahun 2017 meningkat sebesar 0,18%
2. Hingga tahun 2017, persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan adalah 30,46 %
3. Prosentase Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Jayapura adalah 40 %
4. Prosentase jalan kota Jayapura dalam kondisi baik 2017 meningkat sebesar 5,62%
5. Prosentase jumlah masyarakat Kota Jayapura yang mendapatkan akses terhadap air minum tahun 2017 meningkat sebesar 1,53%.

IV.1 Rekomendasi

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja ditahun tahun berikutnya :

1. Untuk peningkatan capaian kinerja Persentase penduduk yang terlayani sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman
 - a. Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - b. Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - c. Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.
2. Untuk peningkatan capaian kinerja persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan
 - a. Menentukan daerah pelayanan persampahan perkotaan

- b. Menentukan rencana tahapan pelayanan persampahan perkotaan
 - c. Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana pelayanan
 - d. Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu
 - e. Melakukan pengangkutan sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali
 - f. Melakukan pengangkutan residu dari TPS 3R secara berkala
 - g. Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, mengangkut sampah sesuai kapasitas kendaraan)
 - h. Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan lindi dari sampah yang menempel di kendaraan
3. Untuk peningkatan capaian kinerja Prosentase Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
- Mengoperasikan TPA sesuai dengan SOP, terutama dalam hal:
- a. Menghitung volume dan/atau berat sampah yang masuk ke TPA
 - b. Membuat perencanaan zonasi penimbunan sampah (sel harian/sel mingguan/sel bulanan)
 - c. Memeriksa kualitas efluen lindi ke laboratorium yang tersertifikasi secara berkala (minimal 1 bulan sekali) dan/atau pada saat perubahan cuaca yang signifikan
 - d. Penangkapan dan pemanfaatan gas
4. Untuk peningkatan capaian kinerja Prosentase jalan kota dalam kondisi baik antara lain :
- a. Memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/ Roughometer).
 - b. Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat:
 - Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/ Roughometer (untuk pengukuran menggunakan alat).
 - Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual).

- c. Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala pada jalan dan jembatan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI.
 - b. Melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan.
5. Untuk peningkatan capaian kinerja prosentase jumlah masyarakat Kota Jayapura yang mendapatkan akses terhadap air minum
- a. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
 - b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
 - c. Pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAYAPURA**



**NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19650814 198703 1 018**